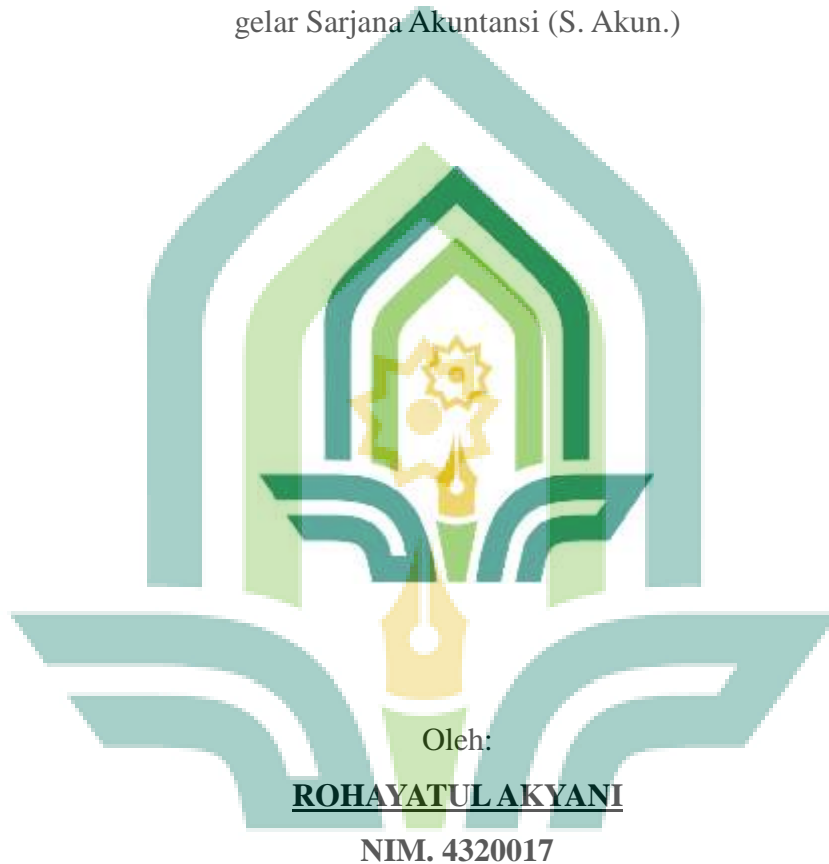


**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018- 2022  
MELALUI PENDEKATAN VALUE FOR MONEY**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun.)



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018- 2022  
MELALUI PENDEKATAN VALUE FOR MONEY**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun.)



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Rohayatul Akyani**

NIM : **4320017**

Judul Skripsi : **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi  
Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018- 2022 Melalui  
Pendekatan *Value for Money***

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 14 juni 2024

Yang menyatakan



**Rohayatul Akyani**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi sdr. Rohayatul Akyani

Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q. Ketua Program Studi Akuntansi Syariah

**PEKALONGAN**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : **Rohayatul Akyani**  
NIM : **4320017**  
Judul Skripsi : **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018- 2022 Melalui Pendekatan *Value for Money***

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 13 Juni 2024

Pembimbing



**Ade Gunawan, M.M**

**NIP. 19810425 201503 1 002**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan, [www.febi.uingusdur.ac.id](http://www.febi.uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi saudara:

Nama : **Rohayatul Akyani**  
NIM : **4320017**  
Judul : **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018- 2022 Melalui Pendekatan Value for Money**

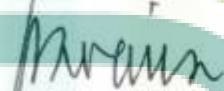
Dosen Pembimbing : **Ade Gunawan, M.M**

Telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun).

Dewan Penguji,

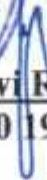
**Penguji I**

**Penguji II**

  
**Karima Tamara, S.T., M.M.**  
**NIP. 19730318 200501 2 002**

  
**Alvita Tyas Dwi Aryani, M.Si.**  
**NIP. 1984061 2201903 2 011**

  
Pekalongan, 17 Juli 2024  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
**Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750220 199903 2 001**

## MOTTO

“Dibalik takdir yang membuat kita menangis, ada takdir yang belum kita ketahui. Mustahil Allah menyuruh kita bertahan tanpa sebuah alasan. Terkadang harus sakit dan sedih dulu, baru bahagia. Tidak akan matahari mendahului bulan dan tidak akan pula malam mendahului siang, semua sudah ada garis edarnya dan sudah ada. Selalu semangat dan ingat firman Allah bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(setitikrindu.co)

“Start now, perfect later. Intinya adalah mulai aja dulu dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Masalah sempurna itu urusan belakangan. Sama halnya seperti skripsi, karena skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai”

(jakartastudent.id)

## PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia Pendidikan. Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak mendapat berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terimakasih dari penulis kepada pihak- pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan skripsi ini:

1. Bapak Asari dan Ibu Wastri selaku kedua orang tua tercinta.
2. Kedua kakak saya Khunaenah dan Samsul Ma'arif beserta seluruh keluarga yang selalu menyemangati saya.
3. Almamater saya Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Ade Gunawan, M.M selaku dosen pembimbing yang telah membimbing saya dalam mengerjakan skripsi dengan baik dan sabar.
5. Bapak Gunawan Aji, M.Si selaku dosen penasehat akademik, saya mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingannya selama ini.

6. Rokhmatus Solekha, Rohmatul Laeli, Kurmanisah dan masih banyak nama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu selaku sahabat seperjuangan pada masa perkuliahan hingga proses pembuatan skripsi.
7. Teman- teman Program Studi Akuntansi Syariah 2020 yang telah menemani sepanjang masa perkuliahan.





## ABSTRAK

### **ROHAYATUL AKYANI, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018- 2022 Melalui Pendekatan *Value for Money***

Sejak ditetapkannya anggaran berbasis kinerja setiap organisasi sektor publik khususnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dituntut agar mampu memiliki kinerja keuangan pemerintahan yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah melalui pendekatan *value for money*.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan datanya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/ kota pada Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan metode pengambilan sampel yaitu metode sensus atau sampel jenuh sehingga setiap populasi diambil sebagai sampel dalam penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018- 2022. Teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah tahun 2018- 2022 belum memenuhi prinsip *value for money* dari elemen ekonomis dapat diketahui periode tahun 2018- 2022 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah telah mampu melakukan penghematan dengan rasio ekonomis sebesar 98% pada tahun 2018 dan 2019, 88% pada tahun 2020, 95% pada tahun 2021, dan 97% pada tahun 2022. Pada rasio efektivitas masuk ke dalam kategori efektif dengan masing- masing tahun perolehan presentasinya yaitu tahun 2018 sebesar 101%, tahun 2019 presentasinya 100%, pada tahun 2020 presentasinya 90%, dan pada tahun 2021 dan 2022 presentasinya sebesar 99%. Namun dari rasio efisien masuk kedalam kategori kurang efisien dengan masing- masing perolehan presentase pada tahun 2018 sebesar 99%, pada tahun 2019 dan 2020 sebesar 101%, pada tahun 2021 presentasinya sebesar 97% dan tahun 2022 sebesar 99%.

**Kata Kunci:** kinerja keuangan, *value for money*, ekonomis, efisiensi, efektivitas

## ABSTRACT

### **ROHAYATULAKYANI, *Analysis of the Financial Performance of the Regional Government of Central Java Province for the 2018-2022 Fiscal Year Through the Value for Money Approach***

*Since the establishment of performance-based budgeting, every public sector organization, especially local governments and central governments, is required to be able to have good government financial performance. The purpose of this study is to measure the financial performance of local governments through the value for money approach.*

*This research is quantitative research. In this study using documentation as a data collection technique. The population in this study were all districts / cities in Central Java Province. Based on the sampling method, namely the census method or saturated sample so that each population is taken as a sample in the study. The data used in this study are the Budget Realization and Expenditure Reports of the Regional Government of Central Java Province for the 2018-2022 fiscal year. The data analysis technique used is descriptive analysis.*

*The results of this study indicate that the financial performance of the Central Java Regional Government in 2018-2022 has not fulfilled the principle of value for money from the economic element, it can be seen that the period 2018-2022 the Regional Government of Central Java Province has been able to make savings with an economic ratio of 98% in 2018 and 2019, 88% in 2020, 95% in 2021, and 97% in 2022. In the effectiveness ratio, it falls into the effective category with each year of the percentage acquisition, namely in 2018 by 101%, in 2019 the percentage is 100%, in 2020 the percentage is 90%, and in 2021 and 2022 the percentage is 99%. However, from the efficient ratio, it falls into the less efficient category with each percentage acquisition in 2018 of 99%, in 2019 and 2020 of 101%, in 2021 the percentage is 97% and in 2022 it is 99%.*

**Keywords:** *financial performance, value for money, economy, efficiency, effectiveness*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi Jurusan Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H. selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. H. Tamamudin, M.M. Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Ade Gunawan, M.M selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini
5. Bapak Gunawan Aji, M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA)
6. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan dukungan material dan moral

7. Rokhmatus Solekha, Rohmatul Laeli, dan Kurmanisah serta sahabat seperjuangan Akuntansi Syariah selama perkuliahan

8. Seluruh pihak yang turut membantu terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 14 Juni 2024

Yang menyatakan



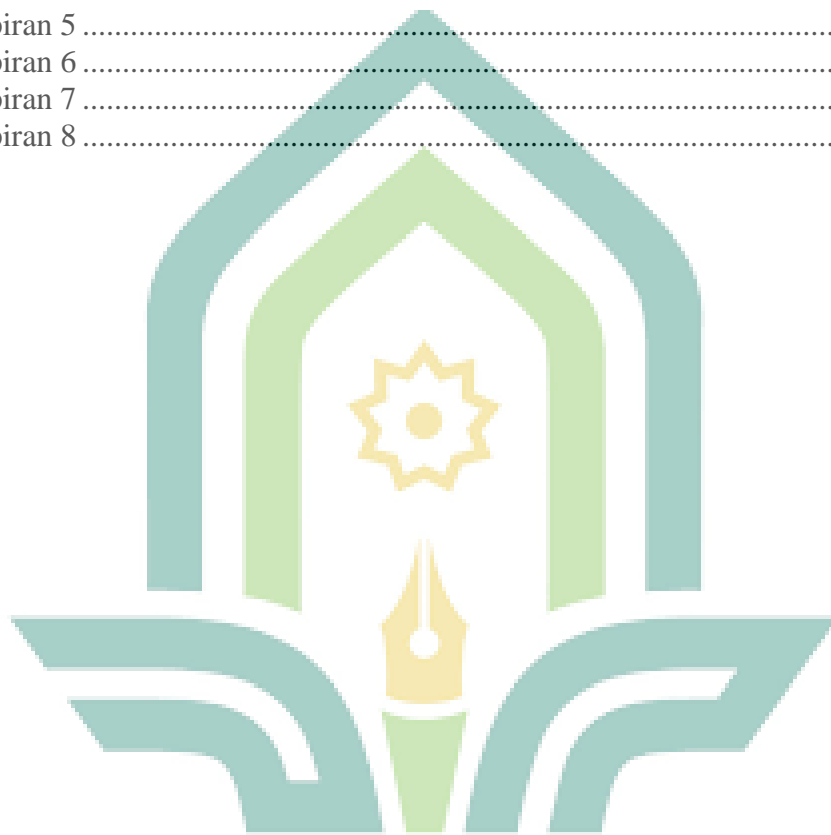
Rohayatul Akyani



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xx
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	13
A. Landasan Teori .....	13
B. Telaah Pustaka .....	31
C. Kerangka Berpikir .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	39
A. Jenis Penelitian .....	39
B. Pendekatan Penelitian .....	38
C. Setting Penelitian .....	39
D. Sumber data .....	40
E. Populasi dan Sampel .....	39
F. Teknik Pengumpulan Data .....	41
G. Teknik Analisis Data .....	41
H. Definisi Variabel .....	42
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN</b> .....	46
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	46
B. Objek Penelitian .....	47
C. Data Penelitian .....	47
D. Hasil Perhitungan Data .....	62
E. Pembahasan Analisis .....	107

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	122
	A. Kesimpulan .....	122
	B. Saran .....	122
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		124
<b>LAMPIRAN</b> .....		I
Lampiran 1 .....		I
Lampiran 2 .....		V
Lampiran 3 .....		IX
Lampiran 4 .....		XIII
Lampiran 5 .....		XVII
Lampiran 6 .....		XXII
Lampiran 7 .....		XXVII
Lampiran 8 .....		XXXII



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987.

Secara garis besar pedoman transliterasi tersebut sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	a		Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha		Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	al		Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ad		Es (dengan titik di bawah)
ض	ad		de (dengan titik di bawah)
ط	a		te (dengan titik di bawah)

ظ	a		zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
'	Fathah	A	A
◌◊	Kasrah	I	I
◌◊◊	Dhammah	U	U

### 2) Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌◊◊...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
◌◊◊...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

## 3. Mahdah



Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
...	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
...	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

#### 4. Ta' Marbutah

- 1) Ta' marbutah hidup (ditransliterasikan dengan "t")

Contoh:

الأطفال روضة - rau ah al-a f l

- 2) Ta' marbutah mati (ditransliterasikan dengan "h")

Contoh:

- talhah

#### 5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddahitu.

Contoh:

-nazzala

-al- birr

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

Contoh:

-ar- rajulu

-as- syamsu

-al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

-syai'un

-inna



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018- 2022	6
Tabel 1.2	Jumlah Kabupaten/ Kota yang mengalami defisit anggaran ....	7
Tabel 2.1	Kriteria Rasio Ekonomis .....	27
Tabel 2.2	Kriteria Rasio Efisiensi .....	28
Tabel 2.3	Kriteria Rasio Efektivitas .....	28
Tabel 4.1	Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.....	47
Tabel 4.2	Data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 .....	48
Tabel 4.3	Data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 .....	51
Tabel 4.4	Data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 .....	54
Tabel 4.5	Data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 .....	57
Tabel 4.6	Data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 .....	60
Tabel 4.7	Hasil Perhitungan Rasio Ekonomis Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.....	64
Tabel 4.8	Hasil Perhitungan Rasio Ekonomis Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.....	67
Tabel 4.9	Hasil Perhitungan Rasio Ekonomis Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.....	70
Tabel 4.10	Hasil Perhitungan Rasio Ekonomis Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.....	73
Tabel 4.11	Hasil Perhitungan Rasio Ekonomis Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.....	76
Tabel 4.12	Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.....	79
Tabel 4.13	Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.....	82

Tabel 4.14	Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.....	85
Tabel 4.15	Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.....	88
Tabel 4.16	Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.....	90
Tabel 4.17	Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.....	93
Tabel 4.18	Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.....	96
Tabel 4.19	Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.....	98
Tabel 4.20	Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.....	101
Tabel 4.21	Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.....	104
Tabel 4.22	Ringkasan Hasil Pengukuran Rasio Ekonomis Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah .....	117
Tabel 4.23	Ringkasan Hasil Pengukuran Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah .....	118
Tabel 4.24	Ringkasan Hasil Pengukuran Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah .....	120

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Model Penelitian .....	38
------------	------------------------	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2018- 2022.....	I
Lampiran 2	Data Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018- 2022 .....	V
Lampiran 3	Data Anggaran Belanja Daerah Tahun 2018- 2022 .....	IX
Lampiran 4	Data Anggaran Belanja Daerah Tahun 2018- 2022 .....	XIII
Lampiran 5	Daftar Kabupaten/ Kota dan Tingkat Ekonomisnya di Tahun 2018- 2022.....	XVII
Lampiran 6	Daftar Kabupaten/ Kota dan Tingkat Efektivitas di Tahun 2018- 2022.....	XXII
Lampiran 7	Daftar Kabupaten/ Kota dan Tingkat Efisiensinya di Tahun 2018- 2022.....	XXVII
Lampiran 7	Daftar Riwayat Hidup.....	XXXII

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara dengan prinsip otonominya yang luas. Otonomi daerah diartikan sebagai wewenang, hak serta kewajiban daerah otonom untuk mengelola dan mengatur sendiri urusan yang berkaitan dengan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari adanya pelaksanaan otonomi daerah sendiri adalah untuk mensejahterakan masyarakat di daerah otonom. Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat daerah di Indonesia yang belum optimal dalam melaksanakan serta mewujudkan tujuan tersebut (Syam and Zulfikar 2022).

Suatu daerah dapat dikatakan maju dan berkembang jika mampu menciptakan roda pemerintahan yang bersih, transparan, penerapan *value for money* yang benar serta akuntabilitas yang tinggi. Pemerintah daerah merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk mengatur rumah tangga pemerintah daerah, pembangunan daerah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang luas. Pemerintah daerah memiliki tujuan yang harus dipenuhi yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik dan benar meliputi pendidikan, kesehatan masyarakat, penegakan hukum, transportasi publik, infrastruktur dan penyediaan barang kebutuhan masyarakat (Jacson 2023).

Hasibuan (2001) dalam (Nasir, Basalamah, and Murfat 2020) menjelaskan bahwa kinerja merupakan suatu hasil yang dapat dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas- tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesanggupan dan waktu. Agar dapat menilai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan serta target yang sudah direncanakan maka diperlukan adanya pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik memiliki tiga tujuan yaitu membantu memperbaiki kinerja pemerintah, yang kedua untuk mengalokasikan sumber daya serta tolak ukur pengambilan keputusan dan yang terakhir adalah sebagai wujud dari pertanggungjawaban publik dan memperbaiki kelembagaan (Sibarani 2023).

Dalam Organisasi sektor publik kinerja keuangan merupakan hal yang sangat penting untuk dibahas, dikarenakan sejak ditetapkannya anggaran berbasis kinerja setiap organisasi sektor publik khususnya pemerintahan baik pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dituntut agar mampu memiliki kinerja keuangan pemerintahan yang baik. Pemerintah daerah dituntut tidak melakukan tindakan pemborosan, kebocoran dana serta dapat mendeteksi program- program yang kurang layak untuk memenuhi tuntutan atas meningkatnya akuntabilitas publik (Naibaho 2023).

Menurut (Mardiasmo 2018) pengukuran kinerja keuangan pemerintah merupakan bagian dari pengukuran kinerja keuangan organisasi sektor publik yang bertujuan untuk membantu manajemen publik menilai pencapaian suatu strategi memulai alat ukur finansial dan nonfinansial. Pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai salah satu alat evaluasi mengenai kegiatan yang telah



dilaksanakan sehingga juga dikatakan sebagai alat pertimbangan pengambilan keputusan.

Terdapat dua alat ukur dalam pengukuran kinerja keuangan yaitu *value for money* dan *balance score card*. *Balance score card* pertama kali diperkenalkan sebagai alat untuk menilai kinerja pada perusahaan komersil sedangkan *value for money* pada sektor publik. Pengukuran kinerja metode *balance score card* terdapat 4 indikator yaitu perspektif keuangan, perspektif konsumen, perspektif proses bisnis dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (Sholikhah dan Khoiriawati 2022). Sedangkan *Value for money* adalah sebuah konsep yang mengatur organisasi sektor publik berdasarkan tiga faktor utama yaitu ekonomis, efektif dan efisien (Mardiasmo 2018).

Value for Money (VFM) menggunakan 3 rasio dalam pengukuran kinerjanya, yaitu Rasio Ekonomi, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi. Rasio ekonomi digunakan untuk mengukur Tingkat kehematan dari pengeluaran suatu organisasi sektor publik, pada pengukuran ini menggunakan data anggaran belanja dan realisasinya. Pada rasio ini kinerja keuangan dapat dikatakan semakin baik apabila presentase ekonomisnya semakin kecil. Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah dalam segi pendapatannya. Semakin besar rasio efektivitas yang dihasilkan maka akan semakin baik kinerja keuangan yang semakin efektif. Sedangkan rasio efisiensi adalah pengukuran kinerja dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diperoleh, semakin kecil rasio efisiensi

yang dihasilkan maka akan menggambarkan kinerja pemerintah daerah yang semakin baik (Lastari 2020).

Pengukuran kinerja tersebut dapat dilakukan dengan melakukan penelaahan terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menjabarkan kegiatan keuangan daerah sebagai bentuk representasi kepatuhan daerah terhadap APBD. Laporan Realisasi anggaran adalah hasil dari proses akuntansi yang berisi aktivitas serta pengelolaan data keuangan untuk disajikan dalam bentuk laporan atau ikhtisar- iktisar lainnya yang dapat digunakan untuk membantu para pemakainya dalam atau mengambil keputusan. Jika dibandingkan dengan dengan neraca, laporan realisasi anggaran memiliki prioritas yang lebih penting dalam laporan ini menyajikan sumber, lokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan (Naffa Litauji 2021).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah perangkat kebijakan utama bagi pemerintah daerah yang mana APBD memegang peranan penting dalam usaha perluasan kemampuan dan evektivitas pemerintah. Pengelolaan keuangan daerah terkait APBD perlu ditetapkan standar untuk menetapkan suatu daerah tersebut sudah mandiri, efektif, efisien serta akuntabel (Deasy Ervina 2023). Provinsi jawa Tengah merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki luas wilayah 3,26 juta hektar luas wilayah atau kisaran 26% dari luas pulau jawa dan 1,71% dari luas Indonesia (Bilqis and Priyono 2023). Secara administratif jumlah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Berdasarkan data yang diperoleh

dari website <https://jateng.beta.bps.go.id/id/infographic?id=918> milik Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah per bulan Maret 2022 jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai 3,83 juta jiwa dengan kabupaten brebes sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak yakni 290,66 ribu jiwa dan kabupaten kebumen merupakan kabupaten dengan presentase miskin terbesar yakni 16,41% (Badan Pusat Statistik, n.d.). Dalam peringkat nasional, Jawa Tengah menjadi provinsi termiskin kedua di Jawa, dengan presentase 10,77% (Sari Hardiyanto 2023). Hal tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi daerah dapat dinilai belum optimal, karena segenap potensi yang dimiliki daerah belum dikembangkan secara maksimal bagi perekonomian. Dalam era otonomi daerah tentunya sangat diperlukan tercapainya otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sehingga pemerintah daerah harus berupaya menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan yang intensif (Destiniasih, Achasa, and Septiani 2019).

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota Tahun 2018- 2022 diperoleh sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.1  
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018- 2022

Tahun	Pendapatan Daerah	
	Anggaran	Realisasi
2018	24.413.659.858.000	24.702.318.190.582
2019	25.965.581.322.000	25.859.780.137.936
2020	28.301.075.368.000	25.393.735.934.148
2021	26.840.833.343.000	26.633.000.085.963
2022	24.303.739.912.000	24.167.935.634.127

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten/ Kota, diolah peneliti

Dari data di atas, pada tahun 2018, provinsi Jawa Tengah sudah mampu merealisasikan anggaran pendapatan melebihi target yang sudah ditetapkan sebesar Rp. 288.658.332.582,00 atau sebesar 1,19%. Kemudian tahun 2019-2022 realisasi anggaran pendapatan pada Provinsi Jawa Tengah tidak mencapai target anggaran. Pada tahun 2019 realisasi anggaran pendapatan Provinsi Jawa Tengah tidak ter-realisis sebesar 0,40% atau sebesar 105.801.184.064,00. Pada tahun 2020 tidak ter-realisis sebesar 10,28% atau 2.907.339.433.852, dari target realisasi. kemudian tahun 2021 kembali tidak ter-realisis sebesar 0,78% atau Rp. 207.833.257.037,00 dari target realisasi pendapatan dan kemudian pada tahun 2022 tidak ter-realisis kembali sebesar 0,56% atau sebesar 135.804.277.873,00. Yesica Lola (2016) menyebutkan bahwa pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila dapat memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang telah dianggarkan, sebaliknya apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka akan dinilai kurang baik. Selisih lebih dari realisasi pendapatan merupakan selisih yang diharapkan (*favorable variance*) sedangkan selisih kurang merupakan selisih yang tidak diharapkan (*unfavorable variance*).

Jika dilihat dari sisi penggunaan belanja dan pendapatannya kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2018- 2022 yang mengalami defisit anggaran jumlahnya selalu berubah setiap tahunnya. Yang disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1.2

Jumlah Kabupaten/ Kota yang mengalami defisit anggaran Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Kabupaten/ Kota
2018	18
2019	19
2020	7
2021	2
2022	28

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2018-2022, diolah peneliti

Defisit anggaran merupakan keadaan yang terjadi apabila oleh suatu pengeluaran yang berlebihan dari pada penerimaan (Ulum and Gisela Syaputri 2021). Kondisi defisit ini dianggap negatif karena bisa menunjukkan ketidakseimbangan keuangan yang berkelanjutan dan berpotensi mengurangi kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan publik. Defisit anggaran diartikan sebagai indikator dari beberapa masalah yang lebih dalam, termasuk pengelolaan keuangan yang kurang efektif, pendapatan yang terbatas serta prioritas pengeluaran yang mungkin belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Selain itu terjadinya defisit anggaran juga mencakup keterbatasan dalam pelaksanaan program- program Pembangunan yang bersifat strategis dan berkelanjutan (Kurnia Mayasari 2024).

Menurut (Suriadi 2013) defisit yang terjadi selama satu tahun dapat bersifat sementara, sedangkan defisit yang terjadi selama tiga tahun berturut-turut menunjukkan terdapat ketidakseimbangan fiskal. Ketidakseimbangan fiskal merupakan salah satu masalah dalam kinerja keuangan karena dapat memberikan dampak negatif terhadap keuangan pemerintah daerah dan

ekonomi secara keseluruhan seperti pengeluaran yang tidak efektif. Dengan meningkatnya jumlah kabupaten/ kota yang mengalami defisit di Jawa Tengah analisis dengan menggunakan alat pengukuran value for money cocok dilakukan pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mengetahui kabupaten/ kota mana yang kinerja keuangan pemerintah kurang baik sehingga dapat membantu serta mengevaluasi pemerintah daerah dalam merencanakan anggaran yang lebih baik untuk masa mendatang.

Penelitian yang dilakukan oleh (Esislahyenti, Mursalini, dan Indrawati 2023) Pada Dinas Sosial Kabupaten Solok menunjukkan bahwa kinerja pada dinas sosial kabupaten solok pada tahun 2020-2022 sudah memenuhi prinsip *value for money*, jika dilihat dari elemen ekonomi dan efisiensi dinas sosial kabupaten Solok telah mampu menyelenggarakan seluruh program secara ekonomis dan efisien, namun jika dilihat dari elemen efektivitas dapat pada tahun 2020- 2021 dinas sosial kabupaten Solok belum dapat dikategorikan efektif dikarenakan indikator kerja yang ditetapkan belum bisa dilaksanakan sepenuhnya, dan pada tahun 2022 dinas sosial kabupaten solok telah menyelenggarakan secara efektif.

Penelitian pengukuran kinerja keuangan dengan pendekatan *Value for Money* pada kantor kecamatan Gedeg Periode 2017- 2021 yang dilakukan oleh (Dinanty et al. 2023) hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan pendekatan *Value for Money* dengan menggunakan kriteria ekonomis, efisien, dan efektif. Dengan hasil menunjukkan kriteria cukup ekonomis, cukup efisien, dan sangat efektif. Penelitian serupa dilakukan oleh (Sholikhah and

Khoiriawati 2022) pada APBDes desa pucangsimo tahun anggaran 2017-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan desa pucangsimo termasuk kedalam kategori ekonomis, sedangkan dari segi efisiensi pada tahun 2018 – 2019 menunjukkan hasil efisien sedangkan pada tahun 2017, 2020 dan 2021 menunjukkan hasil tidak efisien. Dan dari segi efektivitas pada tahun 2017-2019 menunjukkan hasil efektif sedangkan pada tahun 2020- 2021 menunjukkan hasil cukup efektif.

Berdasarkan paparan teori, fenomena serta penelitian terdahulu di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian selama 5 tahun yaitu dari tahun 2018-2022 dengan menggunakan pendekatan *value for money* pada pemerintah provinsi jawa tengah. *Value for money* diperlukan agar pengeluar dapat digunakan sesuai dengan rencana kinerja yang baik, dikarenakan jika pengeluaran yang dimanfaatkan sebaik- baiknya akan memberikan output yang baik sehingga akan memberikan hasil yang maksimal. Oleh karena itu penulis memberi judul penelitian ini “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018- 2022 Melalui Pendekatan *Value for Money*”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah ditinjau dari Rasio ekonomi?
2. Bagaimana pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah ditinjau dari Rasio efektivitas?

3. Bagaimana pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah ditinjau dari Rasio efisiensi?
4. Bagaimana analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah ditinjau dari pendekatan Value for Money?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengukur dan mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2018- 2022 dengan metode *value for money* ditinjau dari rasio ekonomis
2. Untuk mengukur dan mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2018- 2022 dengan metode *value for money* ditinjau dari rasio efisiensi
3. Untuk mengukur dan mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2018- 2022 dengan metode *value for money* ditinjau dari rasio efektifitas
4. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun anggaran 2018- 2022 ditinjau dari pendekatan Value for Money

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia Pendidikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada cabang ilmu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Manfaat Praktis



Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya yaitu:

- a. Sebagai masukan bagi pemerintah provinsi jawa tengah dan pemerintah daerah kabupaten/ kota yang termasuk kedalam wilayah provinsi jawa Tengah dalam hal peningkatan kinerja keuangannya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas penelitian selanjutnya supaya menjadi penelitian yang lebih baik sehingga dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukan.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian.

##### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini memuat mengenai tentang tinjauan pustaka dan landasan teori yang sesuai dengan tema penelitian

##### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat secara rinci mengenai metode penelitian yang digunakan beserta alasan, jenis penelitian, setting penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

##### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi gambaran hasil penelitian serta analisa. Hasil dan pembahasan penelitian disesuaikan dengan rumusan masalah serta pendekatan penelitian yang digunakan.

## BAB V PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran maupun rekomendasi dalam penulisan skripsi. Kesimpulan berisi ringkasan dari penelitian yang telah dilaksanakan sedangkan saran merupakan rekomendasi yang perlu diambil oleh pihak- pihak terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mendapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2018- 2022, 66% kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah bersifat ekonomis
2. Pada tahun 2018- 2022, 58% kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah bersifat kurang efisien, sedangkan 40% tidak efisien dan 2% cukup efisien
3. Pada tahun 2018- 2022, 59% kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah sudah efektif
4. Pengukuran kinerja keuangan menggunakan konsep *Value for Money* Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah masih belum sepenuhnya baik, dikarenakan salah satu indikator pengukurannya yaitu rasio efisiensi masih tergolong kurang efisien disebabkan karena perbandingan pendapatan daerah dengan belanja daerah yang kurang signifikan yang menyebabkan presentase rasio efisensinya berada diangka 97-101% dan tergolong kurang efisien, sedangkan rasio ekonomis dan rasio efektivitas nya baik karena masing-masing tergolong kategori ekonomis dan efektif.

#### B. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu:

1. Masih menggunakan satu provinsi dalam penelitian sehingga Diharapkan penelitian selanjutnya dilakukan pada dua objek provinsi yang berbeda,

sehingga dapat dijadikan bahan perbandingan untuk kemajuan kinerja keuangan sektor publik di Indonesia.

2. Masih minimnya hasil riset terdahulu yang meneliti menggunakan setiap kabupaten dalam untuk menarik satu Kesimpulan hasil dalam satu provinsi.
3. Rasio yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan hanya memuat 3 rasio, sehingga diupayakan agar peneliti selanjutnya dapat lebih mengembangkan rasio pengukuran yang digunakan.

### **C. Implikasi Teoritis dan Praktis**

#### **1. Implikasi Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berimplikasi pada kinerja keuangan pemerintah sehingga kedepannya dapat meningkatkan pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan dan akan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.

#### **2. Implikasi Teoritis**

Berkontribusi berupa menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur melalui 3 elemen pokok yaitu rasio ekonomis, rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Dari ketiga elemen tersebut menghasilkan kinerja keuangan yang dapat meningkatkan reputasi pemerintah daerah selaku pengelola keuangan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, M. S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, & S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., and R. R. (Istiqomah. 2020. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Issue March)*).
- Andaresya, Iqva. 2022. "Pengaruh Dana Perimbangan Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Daerah." Universitas Komputer Indonesia.
- Anynda, Nur Shafira, and Suwardi Bambang Hermanto. 2020. "Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 9 (10): 1–20. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/3690/3705/>.
- Asep Risman, and Matrodji Mustaffa. 2023. "LITERASI KEUANGAN BAGI UMKM: Laporan Keuangan Untuk Pengembangan Usaha UMKM." *Jurnal Abdimas Perbanas* 4 (1): 20–27. <https://doi.org/10.56174/jap.v4i1.521>.
- Aulia, Erlinda Nur, and Agustina Prativi Nugraheni. 2022. "Analisis Value for Money Dengan Pendekatan Efektivitas Pada Kinerja Keuangan Kota Semarang Pada Tahun Anggaran 2017-2021." *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan* 2 (6): 413–20. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i6.308>.
- Badan Pusat Statistik. n.d. "Potret Kemiskinan Jawa Tengah Maret 2022." <https://jateng.beta.bps.go.id/id/infographic?id=918>.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Biduri, Sarwenda. 2018. *Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik*. Edited by Fika Megawati. Cetakan pe. Sidoarjo, Jawa Timur: UMSIDA.
- Bilqis, Husnun Karina, and Nuwun Priyono. 2023. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2020." *Jurnal Economina* 2 (2): 612–21. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.340>.
- Deasy Ervina, Siti Mu'alimah. 2023. "Analisis Kinerja Keuangan Dalam Pengelolaan APBD Kabupaten Tuban Di Masa Pandemi Covid-19." *Journal of Finance and Accounting Studies* 5 (2): 1–9.
- Deddi Nordiawan, Ayuningtyas Herianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.

- Destiningsih, Rian, Andhatu Achasa, and Yustirania Septiani. 2019. "Analisis Potensi Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus: Tahun 2010-2016)." *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* 4 (1): 73–86. <http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP>.
- Dharma, Dias Adi, Djunaidy Djunaidy, Prisila Damayanty, Mala Sitianingsih, Septiana Rindika Putri, and Thoha Solehudin. 2023. "Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Umkm Di Kecamatan Tapos - Kota Depok." *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 6 (2): 216–23. <https://doi.org/10.32509/abdimoestopo.v6i2.3082>.
- Dinanty, Dara Nadeya, Nur Ainiyah, Hartono, and Nurdiana Fitri Isnaini. 2023. "Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Dan Rasio Keuangan Di Kantor Kecamatan Gedeg Periode 2017-2021." *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 3 (4): 173-183 e-ISSN: 2962-3987; p-ISSN: 2962-4428.
- Esislahyenti, Wahyu Indah Mursalini, and Netti Indrawati. 2023. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Pendekatan Value For Money (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Kabupaten Solok)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (3): 26454–65. <https://doi.org/2614-6754>.
- Fadillah, Riyan Musofadillah, Khusnik Hudzafidah, and Trivosa Aprilia Novadiani Haidiputri. 2023. "Analisis Metode Value For Money Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Probolinggo." *JUMAD: Journal Management, Accounting, & Digital Business* 1 (2): 161–70. <https://doi.org/10.51747/jumad.v1i2.1352>.
- Fitra, Halkadri. 2019. *Analisis Neraca Dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*. Edited by Yorim N Lasboi. Cetakan Pe. Malang: CV IRDH.
- Hakiki, Raka Mahyudin. 2016. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis Value for Money Di Kota Mojokerto."
- Harahap, Heri Faisal. 2020. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4 (1): 34. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>.
- Hasibuan, M. R. 2001. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sosial (Social Disclosures) Dalam Laporan Tahunan Emitmen Di Bursa Efek Jakarta Dan Bursa Efek Surabaya."
- Jacson, Ricky. 2023. "Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Bkad) Kabupaten Sleman." Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

- Karina, Luthfia Ayu, and Wahyu Ramadhani. 2022. "Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Konsep Value for Money Pada Blud Puskesmas Murung Pudak Kabupaten Tabalong." *Value* 2 (2): 71–82. <https://doi.org/10.36490/value.v2i2.214>.
- Karina, Nisfi Nova, and Puji Wibowo. 2022. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19." *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Dan Akuntansi* 14 (2): 146–66. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v14i2.4512>.
- Komada, Fitri Dwi. 2021. "Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kabupaten Cianjur Periode Tahun Anggaran 2016-2020 Bogor Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2016-2020 Skripsi," 1–145.
- Kurnia Mayasari, Fitri. 2024. "Defisit Anggaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Dan Ketergantungan Pada Dana Pusat." Kompas.Com. 2024. <https://www.kompasiana.com/fitrikurniamayasari4198/662f2b50de948f04af2cdf33/defisit-anggaran-pemerintah-kabupaten-pasuruan-dan-ketergantungan-pada-dana-pusat>.
- Kusumawati, Nugrahini, and Raden Irna Afriani. 2017. "16. Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dengan Menggunakan Rasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Serang." *Jurnal Akuntansi* 4 (2): 1–11.
- Lastari, Er Fiana. 2020. "Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Value for Money (Studi Pada Provinsi D.I. Yogyakarta Periode Tahun 2015 - 2019)."
- M. Iqbal Ashari, M. Elfan Kaukab. 2020. "Analisis Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 2 (5): 728–40.
- Mahbengi, Syahri. 2017. "Analisis Value for Money Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mahsun. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPF.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Muttaqin. n.d. "7 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Jenis, Komponen, Unsur)." Muttaqin ID.
- Naffa Litauji, Milla. 2021. "Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Kecamatan Kramat." Politeknik Harapan Bersama Tegal.

- Naibaho, D.Y. 2023. “Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi.” Universitas Hindu Negeri.
- Nasir, Munawir, Jafar Basalamah, and Moh Zulkifli Murfat. 2020. “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Situasional, Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai.” *Jurnal Akrab Juara* 1 (April): 1–11. <https://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/1001>.
- Polii, I R A, D P E Saerang, and S J Tangkuman. 2020. “Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value for Money.” *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi* 8 (4): 781–88.
- Putri Nurafifah, Indah, Haliah Haliah, and Nirwana Nirwana. 2022. “Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Pendekatan Value for Money (Studi Kasus Pada Kabupaten Nabire Tahun 2019-2021).” *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 2 (2): 56–71. <https://doi.org/10.51903/jiab.v2i2.170>.
- Rumagit, Intan Bella Putri, Herman Karamoy, and Dhullo Afandi. 2022. “Analisis Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Menggunakan Konsep Value for Money Pada Dinas Pariwisata Kota Manado.” *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 17 (1): 13–22.
- Sahrini Nasution, Alviana, Fauzi Arif Lubis, and Rahmat Daim Harahap. 2023. “Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value for Money Pada Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi* 6 (1): 26454–65.
- Sampow, Richardo Rafael, and Royke I.J Pangkey. 2022. “Value for Money Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah.” *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)* 3 (2): 261–71.
- Samukri, and Rio Gusherinsyah. 2020. “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.” *Jurnal Akuntansi* 9 (1): 58–68.
- Sanjaya, Dika Husni, and Maswar Patuh Priyadi. 2019. “Analisis Value for Money Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya.” *Jurnal Ilmu Dan Riset ...* 8 No.12: 1–16.
- Sari, Berti Indah, and Halma Wati. 2021. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat.” *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 3 (1): 1–11. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i1.356>.



- Sari, G Yulia Novita, Satria Tri Nanda, Ika Berty, and Raisya Zenita. 2022. "Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru." *Jurnal Akuntansi Kompetif* 5 (1): 56–65.
- Sari Hardiyanto, Diva Lutfiana Putri. 2023. "10 Provinsi Termiskin Di Indonesia." *Kompas.Com*, 2023. 10 Provinsi Termiskin di Indonesia 2023, Mana Saja?%0A%0AKlik untuk baca:%0Ahttps://www.kompas.com/tren/read/2023/10/14/103000165/10-provinsi-termiskin-di-indonesia-2023-mana-saja-?utm\_source=Various&utm\_medium=Referral&utm\_campaign=Top\_Desktop%0A%0AKompa.
- Sari Nasution, Adinda. 2021. "ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (PSAP) NO. 02 TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN (STUDI KASUS PADA KANTOR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANDAILING NATAL)." *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA ( UINSU )*. <https://doi.org/10.1080/09638288.2019.1595750><https://doi.org/10.1080/17518423.2017.1368728><http://dx.doi.org/10.1080/17518423.2017.1368728><https://doi.org/10.1016/j.ridd.2020.103766><https://doi.org/10.1080/02640414.2019.1689076><https://doi.org/>
- Sholikhah, Isnah Mar'atus, and Novi Khoiriawati. 2022. "Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Dengan Menggunakan Analisis Value For Money." *BUDGETING : Journal of Business, Management and Accounting* 4 (1): 38–54. <https://doi.org/10.31539/budgeting.v4i1.4132>.
- Sibarani, A. 2023. "Analisis Kinerja Pada Desa Damuli Kebun Kabupaten Labuhan Batu Utara." *Universitas Hindu Sugiwa*. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25246403><http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC4249520>.
- Sita, Erika Rihlitas. 2022. "Penerapan Atas Perlakuan Akuntansi Pendapatan Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai TMC Kediri." *Politeknik Keuangan Negara STAN*.
- Sugiyono. 2016a. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- . 2016b. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suriadi. 2013. "Pembiayaan Defisit Dengan Utang Dan Ketahanan Fiskal Di Indonesia." *The Winners* 14 (2): 127.

- Suryanto, Agus, and Refianto. 2019. "Analisis Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan." *Jurnal Bina Manajemen* 8 (1): 1–33.
- Syam, Fahriansyah, and Ahmad Zulfikar. 2022. "Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Kaimana." *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* 2 (2): 98–114. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i2.2666>.
- Ulum, Muhammad Bahrul, and Ayu Geby Gisela Syaputri. 2021. "Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Di Sumatera Selatan." *Mbia* 20 (2): 111–22. <https://doi.org/10.33557/mbia.v20i2.1383>.
- Utari, Rini, Anisa Nursyabani, Hurun In, Royke Bahagia Rizka, Sandy, and Kurniawan. 2023. "No Title ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DILIHAT DARI RASIO DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL, RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN RASIO EFEKTIFITAS." *Jurnal Eko-Bisma* 2 (2): 204–11.
- Walandouw, Stanley, Jantje Tinangon, and Astria Dien. 2019. "Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung." *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 3 (1): 534–41.
- Widianti, I Gusti Ayu, Nur Fitriyah, and Adhitya Bayu S. 2022. "Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value for Money Pemerintah Daerah Studi Kasus Di Dinas Kesehatan Kota Mataram." *Aktiva : Jurnal Akuntansi Dan Investasi* 7 (1): 1–13. <https://doi.org/10.53712/aktiva.v7i1.1464>.
- Yaman, Afdhal. 2022. "Analisis Kinerja Keuangan Pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta: Pendekatan Value for Money Dan Rasio Keuangan." *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah* 4 (01): 50–66. <https://doi.org/10.33477/eksy.v4i01.3220>.
- Yesica Lola, Arlinda. 2016. "Evaluasi Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Surabaya." STIE PERBANAS SURABAYA. <http://eprints.perbanas.ac.id/id/eprint/1038>.

## LAMPIRAN

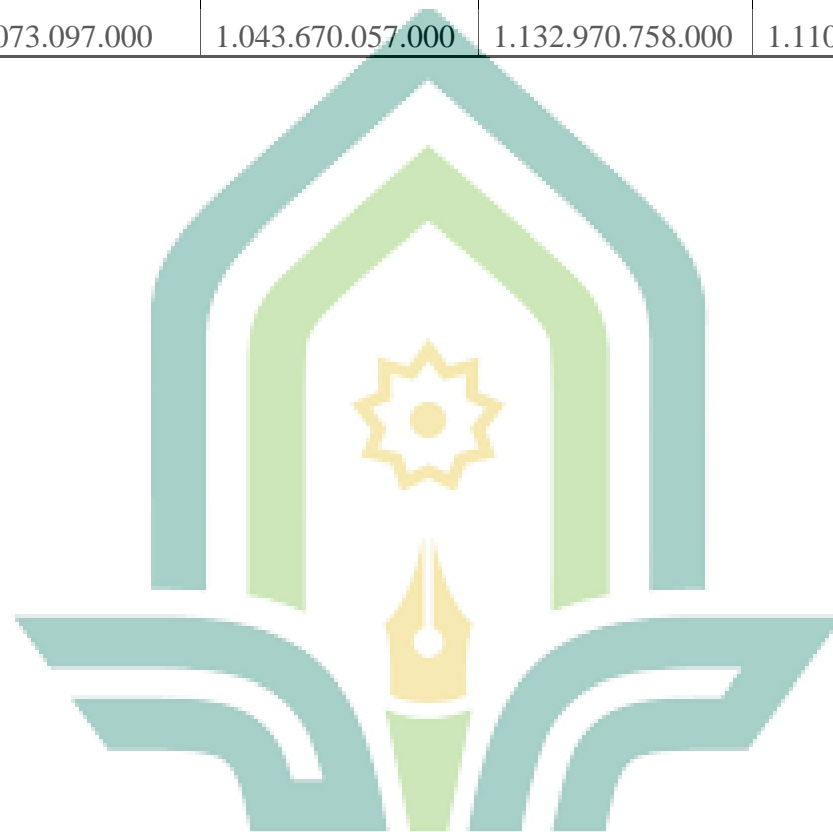
### 1. Lampiran 1: Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2018- 2022

No	Kab/Kota	Anggaran Pendapatan Daerah				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kab. Banjarnegara	2.005.944.976.500	2.083.397.046.500	2.168.786.068.000	2.109.230.397.160	2.104.392.063.000
2.	Kab. Banyumas	3.257.004.283.785	3.427.963.727.000	3.568.568.763.744	3.568.385.311.183	3.567.598.307.620
3.	Kab. Batang	1.654.999.295.702	1.770.598.676.856	1.840.617.425.977	1.786.031.075.369	1.769.326.979.259
4.	Kab. Blora	2.122.662.345.677	2.177.713.893.677	2.169.237.769.900	2.134.712.000.000	2.089.649.657.000
5.	Kab. Boyolali	2.190.553.226.000	2.310.937.250.000	2.388.366.025.000	2.263.727.502.000	2.272.481.438.000
6.	Kab. Brebes	2.814.882.461.000	3.058.498.119.000	3.129.412.939.000	3.097.307.632.000	3.014.349.829.000
7.	Kab. Cilacap	2.948.915.191.000	3.182.182.705.300	3.360.359.382.281	3.317.757.631.415	3.330.360.621.060
8.	Kab. Demak	1.958.433.585.400	2.184.187.681.000	2.302.405.766.000	2.320.606.298.834	2.345.448.116.898
9.	Kab. Grobogan	2.397.669.340.501	2.544.684.210.275	2.612.712.160.808	2.544.323.903.138	2.520.351.860.000
10.	Kab. Jepara	2.120.764.886.000	2.312.890.299.000	2.418.244.390.000	1.999.702.011.000	2.414.976.267.000

No	Kab/Kota	Anggaran Pendapatan Daerah				
		2018	2019	2020	2021	2022
11.	Kab. Karanganyar	2.053.585.660.000	2.123.842.477.000	2.225.308.095.000	2.106.391.299.000	2.109.035.040.500
12.	Kab. Kebumen	2.647.019.919.000	2.805.865.491.000	2.878.556.768.000	2.752.338.008.000	2.746.032.917.000
13.	Kab. Kendal	2.077.470.339.700	2.336.980.510.799	2.337.475.682.657	2.278.236.519.171	2.440.165.813.709
14.	Kab. Klaten	2.512.253.142.500	2.632.374.281.500	2.721.807.486.100	2.520.987.884.551	2.502.398.613.635
15.	Kab. Kudus	1.740.415.531.000	1.714.031.199.000	1.810.667.069.000	1.694.083.999.000	1.966.922.958.000
16.	Kab. Magelang	2.355.843.093.000	2.609.827.555.270	2.621.169.424.000	2.461.908.466.781	2.552.382.081.413
17.	Kab. Pati	2.540.695.960.000	2.730.979.188.000	2.786.249.672.000	2.736.238.607.000	2.690.543.064.000
18.	Kab. Pekalongan	2.136.445.642.800	2.298.856.136.800	2.318.988.832.870	2.240.324.877.404	2.215.434.954.546
19.	Kab. Pemasang	2.187.037.545.000	2.530.353.899.000	2.581.626.461.000	2.548.177.015.000	2.429.931.663.000
20.	Kab. Purbalingga	1.959.697.520.000	2.057.234.747.000	2.042.708.319.000	1.975.765.702.000	2.020.295.478.000
21.	Kab. Purworejo	1.716.967.116.415	2.174.502.717.050	2.297.741.136.901	2.227.598.250.685	2.324.885.307.142
22.	Kab. Rembang	1.760.297.103.655	1.785.139.506.071	1.891.753.253.706	1.766.048.467.000	1.874.516.280.000

No	Kab/Kota	Anggaran Pendapatan Daerah				
		2018	2019	2020	2021	2022
23.	Kab. Semarang	2.079.502.418.000	2.212.881.804.000	2.362.080.875.000	1.996.141.692.000	2.443.240.982.000
24.	Kab. Sragen	1.958.299.648.000	2.141.194.857.000	2.194.236.966.584	2.104.054.355.242	2.152.620.896.665
25.	Kab. Sukoharjo	1.887.374.030.000	1.969.651.846.000	2.039.440.679.000	1.954.129.147.000	1.893.440.960.000
26.	Kab. Tegal	2.615.959.568.000	2.793.763.483.000	2.875.037.755.000	2.771.456.723.000	2.690.855.033.000
27.	Kab. Temanggung	1.699.841.115.051	1.842.970.486.344	1.921.489.274.847	1.890.486.277.894	1.885.886.801.040
28.	Kab. Wonogiri	2.192.011.071.842	2.328.723.495.900	2.351.727.836.675	2.303.664.858.286	2.198.134.332.793
29.	Kab. Wonosobo	1.722.563.823.500	1.887.241.266.214	1.935.748.155.714	1.898.206.473.829	1.934.230.518.694
30.	Kota Magelang	882.759.301.000	911.966.581.000	920.107.354.000	907.280.962.000	819.257.701.625
31.	Kota Pekalongan	927.157.125.000	988.456.228.000	981.361.482.000	937.933.186.000	956.875.257.000
32.	Kota Salatiga	887.972.520.000	913.296.914.000	967.665.251.000	928.511.971.000	879.372.434.000
33.	Kota Semarang	4.301.858.632.218	4.749.249.080.000	5.093.441.461.000	4.760.117.165.040	5.337.927.420.000
34.	Kota Surakarta	1.795.725.874.000	1.928.886.728.000	2.019.861.148.959	1.938.004.441.798	2.135.619.961.790

No	Kab/Kota	Anggaran Pendapatan Daerah				
		2018	2019	2020	2021	2022
35.	Kota Tegal	989.073.097.000	1.043.670.057.000	1.132.970.758.000	1.110.518.197.000	1.085.069.119.000



## 2. Lampiran 2: Data Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018-2022

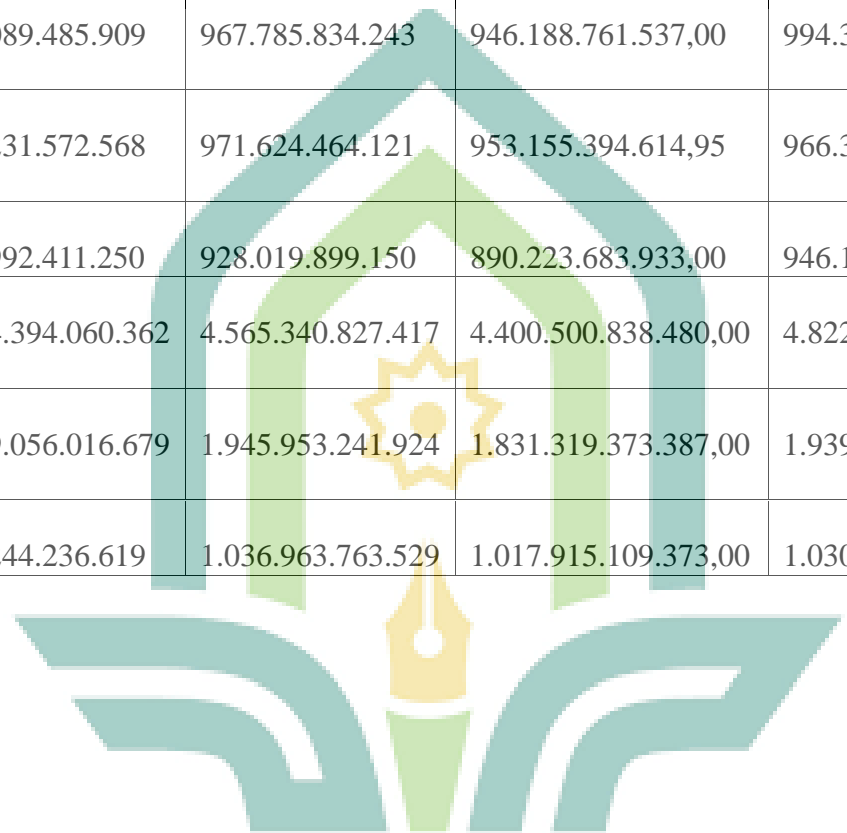
No.	Kab/Kota	Realisasi Pendapatan Daerah				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kab. Banjarnegara	2.074.653.161.695	2.105.990.272.337	1.994.604.106.561,00	2.086.059.742.250	2.044.546.403.305
2.	Kab. Banyumas	3.265.926.651.861	3.434.925.995.303	3.330.186.788.242,00	3.487.722.900.410	3.426.408.181.664
3.	Kab. Batang	1.701.877.299.154	1.769.958.202.416	1.733.087.893.276,46	1.821.822.580.995	1.750.957.035.202
4.	Kab. Blora	2.120.671.434.967	2.240.970.020.181	2.127.946.961.535,00	2.227.065.270.461	2.176.850.305.646
5.	Kab. Boyolali	2.227.780.710.062	2.357.487.210.573	2.382.403.220.150,00	2.430.235.208.978	2.372.372.551.015
6.	Kab. Brebes	2.854.043.939.110	3.096.826.845.150	3.008.370.717.507,14	3.162.140.424.372	2.989.821.990.874
7.	Kab. Cilacap	3.072.112.464.787	3.282.797.966.311	3.152.402.455.712,48	3.334.300.290.656	3.293.132.139.343
8.	Kab. Demak	2.143.306.258.595	2.362.016.248.793	2.333.738.996.798,95	2.365.244.759.686	2.402.717.869.624
9.	Kab. Grobogan	2.439.501.262.356	2.581.437.543.584	2.528.884.131.946,00	2.634.888.673.901	2.588.637.777.477
10.	Kab. Jepara	2.255.843.022.157	2.413.822.993.348	2.315.260.399.485,00	2.380.695.935.358	2.326.937.014.364

No.	Kab/Kota	Realisasi Pendapatan Daerah				
		2018	2019	2020	2021	2022
11.	Kab. Karanganyar	2.113.929.231.663	2.179.409.706.710	2.121.386.179.225,00	2.165.983.748.572	2.251.540.154.854
12.	Kab. Kebumen	2.639.814.864.398	2.818.494.983.541	2.763.229.307.229,80	2.832.035.015.733	2.847.196.017.404
13.	Kab. Kendal	2.138.564.387.700	2.228.384.399.855	2.131.449.784.048,00	2.300.543.641.945	2.265.353.924.690
14.	Kab. Klaten	2.577.961.130.135	2.689.353.252.985	2.578.135.836.354,00	2.570.037.777.373	2.587.693.432.935
15.	Kab. Kudus	1.996.530.094.357	2.090.430.364.413	2.016.176.986.239,00	2.163.634.437.714	2.078.759.801.863
16.	Kab. Magelang	2.302.190.543.616	2.575.439.825.755	2.380.457.680.604,00	2.469.754.315.099	2.558.024.177.090
17.	Kab. Pati	2.789.055.859.854	2.838.881.396.181	2.662.375.437.006,00	2.725.202.350.660	2.705.053.757.861
18.	Kab. Pekalongan	2.101.449.302.497	2.182.770.952.456	2.061.798.474.096,15	2.078.543.512.922	2.074.624.015.397
19.	Kab. Pemasang	2.428.263.885.703	2.636.036.843.851	2.449.008.577.285,00	2.605.029.836.438	2.493.418.191.423
20.	Kab. Purbalingga	1.948.442.029.100	2.076.658.114.142	1.952.749.301.274,00	2.054.843.644.547	2.022.884.629.933



No.	Kab/Kota	Realisasi Pendapatan Daerah				
		2018	2019	2020	2021	2022
21.	Kab. Purworejo	2.049.784.186.054	2.172.436.925.114	2.166.947.747.648,00	2.290.242.967.778	2.185.997.980.027
22.	Kab. Rembang	1.785.911.075.230	1.821.899.884.311	1.878.325.919.915,50	1.911.328.505.019	1.841.484.139.353
23.	Kab. Semarang	2.117.416.566.804	2.311.149.343.922	2.211.273.524.265,97	2.417.282.770.158	2.337.453.499.457
24.	Kab. Sragen	2.176.997.511.640	2.300.826.069.513	2.212.824.974.529,00	2.336.721.727.716	2.177.840.072.042
25.	Kab. Sukoharjo	2.055.517.964.074	2.143.687.569.516	2.040.394.761.328,00	2.119.633.370.538	2.014.818.262.391
26.	Kab. Tegal	2.524.365.919.815	2.755.677.484.152	2.651.771.838.697,60	2.862.559.366.052	2.743.700.525.564
27.	Kab. Temanggung	1.731.235.867.161	1.878.383.823.682	1.830.848.453.347,00	1.971.005.990.029	1.895.483.914.078
28.	Kab. Wonogiri	2.298.176.600.990	2.442.677.972.827	2.273.678.538.635,00	2.303.564.898.937	2.262.263.891.811
29.	Kab. Wonosobo	1.851.441.024.405	1.958.595.025.572	1.878.995.666.418,00	1.967.781.049.592	1.921.189.093.169

No.	Kab/Kota	Realisasi Pendapatan Daerah				
		2018	2019	2020	2021	2022
30.	Kota Magelang	908.089.485.909	967.785.834.243	946.188.761.537,00	994.366.987.776	985.763.798.066
31.	Kota Pekalongan	905.231.572.568	971.624.464.121	953.155.394.614,95	966.372.557.051	989.013.074.926
32.	Kota Salatiga	889.992.411.250	928.019.899.150	890.223.683.933,00	946.191.087.524	918.353.779.916
33.	Kota Semarang	4.234.394.060.362	4.565.340.827.417	4.400.500.838.480,00	4.822.887.281.737	4.969.436.543.013
34.	Kota Surakarta	1.879.056.016.679	1.945.953.241.924	1.831.319.373.387,00	1.939.268.856.769	2.028.438.691.046
35.	Kota Tegal	987.244.236.619	1.036.963.763.529	1.017.915.109.373,00	1.030.986.510.449	1.042.635.845.201



### 3. Lampiran 3: Data Anggaran Belanja Daerah Tahun 2018- 2022

No.	Kab/Kota	Anggaran Belanja Daerah				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kab. Banjarnegara	2.077.621.418.000	2.128.689.824.500	2.247.978.404.000	3.891.819.949.635	2.187.091.604.000
2.	Kab. Banyumas	3.472.253.363.785	3.621.363.727.000	3.743.918.763.744	3.891.819.949.635	3.609.761.269.620
3.	Kab. Batang	1.705.149.533.749	1.821.466.358.456	1.890.617.425.977	1.871.771.478.081	1.829.304.856.259
4.	Kab. Blora	2.158.819.507.692	2.215.590.593.677	2.216.323.769.900	2.198.118.867.915	2.299.649.657.000
5.	Kab. Boyolali	2.242.814.340.000	2.371.992.364.000	2.466.443.423.000	2.282.488.616.000	2.283.011.438.000
6.	Kab. Brebes	2.833.645.748.000	3.256.315.618.000	3.270.994.179.000	3.220.782.215.000	3.193.442.500.600
7.	Kab. Cilacap	3.084.579.637.400	3.352.054.959.317	3.552.204.675.002	3.646.761.863.600	3.503.687.435.633
8.	Kab. Demak	2.014.063.460.400	2.347.587.514.000	2.384.405.766.000	2.386.606.230.534	2.449.631.876.898
9.	Kab. Grobogan	2.383.805.230.083	2.514.428.158.592	2.615.085.522.983	2.497.512.969.115	2.652.101.860.000
10.	Kab. Jepara	2.358.409.053.000	2.331.891.419.000	2.541.691.090.000	2.135.511.005.000	2.580.801.637.020

No.	Kab/Kota	Anggaran Belanja Daerah				
		2018	2019	2020	2021	2022
11.	Kab. Karanganyar	2.150.630.160.000	2.313.588.178.000	2.287.236.745.000	2.135.811.987.000	2.126.535.040.500
12.	Kab. Kebumen	2.812.902.414.000	2.960.999.393.000	3.033.756.768.000	2.818.415.166.000	2.843.725.872.000
13.	Kab. Kendal	2.184.770.769.700	2.445.490.278.577	2.448.834.513.867	2.312.194.067.943	2.507.706.131.219
14.	Kab. Klaten	2.656.503.142.500	2.768.108.345.300	2.906.327.298.100	2.710.853.259.894	2.700.855.921.596
15.	Kab. Kudus	1.803.484.250.000	1.814.797.414.000	1.911.471.464.000	1.848.490.329.807	2.138.777.595.583
16.	Kab. Magelang	2.662.575.016.000	2.671.021.115.200	2.713.496.677.600	2.526.347.858.335	2.692.997.581.732
17.	Kab. Pati	2.647.132.050.000	2.825.572.583.000	2.900.220.672.000	2.842.495.527.000	2.781.043.064.000
18.	Kab. Pekalongan	2.230.242.642.800	2.417.318.278.800	2.446.656.142.301	2.256.232.062.404	2.219.934.954.546
19.	Kab. Pemasang	2.262.937.665.000	2.629.612.484.000	2.828.842.885.000	2.836.829.735.000	2.469.130.208.000
20.	Kab. Purbalingga	1.992.797.269.000	2.101.281.890.000	2.095.813.319.000	2.016.926.613.000	2.077.807.978.000
21.	Kab. Purworejo	1.875.058.304.015	2.215.437.473.275	2.483.287.920.212	2.240.552.293.168	2.480.523.553.127
22.	Kab. Rembang	1.861.907.718.384	1.827.508.350.914	1.964.433.829.762	1.830.578.438.500	2.203.102.306.051

No.	Kab/Kota	Anggaran Belanja Daerah				
		2018	2019	2020	2021	2022
23.	Kab. Semarang	2.132.848.624.000	2.277.672.428.000	2.454.223.181.000	2.090.545.816.000	2.562.935.511.000
24.	Kab. Sragen	2.170.257.833.699	2.146.652.895.644	2.312.886.893.345	2.265.495.152.935	2.382.049.216.160
25.	Kab. Sukoharjo	2.126.525.216.000	2.242.836.997.000	2.392.529.962.000	2.247.461.474.000	2.122.441.234.012
26.	Kab. Tegal	2.789.114.512.000	2.866.763.483.000	2.891.805.253.000	2.894.606.723.000	2.869.008.063.000
27.	Kab. Temanggung	1.723.357.367.620	1.910.778.255.471	1.981.489.274.847	1.949.350.917.532	1.989.495.211.214
28.	Kab. Wonogiri	2.279.376.071.842	2.423.345.895.900	2.474.910.261.874	2.402.581.253.034	2.293.573.309.945
29.	Kab. Wonosobo	1.891.614.169.500	2.028.208.621.480	2.055.345.635.370	1.967.746.230.449	1.996.761.244.159
30.	Kota Magelang	969.216.881.000	1.031.966.581.000	995.607.354.000	980.191.941.000	897.124.309.929
31.	Kota Pekalongan	959.757.125.000	1.026.156.228.000	1.055.857.482.000	983.948.191.000	998.875.257.000
32.	Kota Salatiga	923.362.432.000	949.291.338.000	1.006.404.906.000	978.129.530.000	918.603.528.410
33.	Kota Semarang	5.170.158.970.218	5.134.427.774.000	5.256.092.789.000	4.854.391.169.040	5.544.227.029.000
34.	Kota Surakarta	1.905.769.955.034	2.001.997.784.000	2.109.290.676.959	1.974.612.835.274	2.239.295.961.790

No.	Kab/Kota	Anggaran Belanja Daerah				
		2018	2019	2020	2021	2022
35.	Kota Tegal	1.089.919.641.000	1.120.465.803.000	1.278.393.100.000	1.257.032.719.040	1.164.677.631.206

#### 4. Lampiran 4: Data Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018- 2022

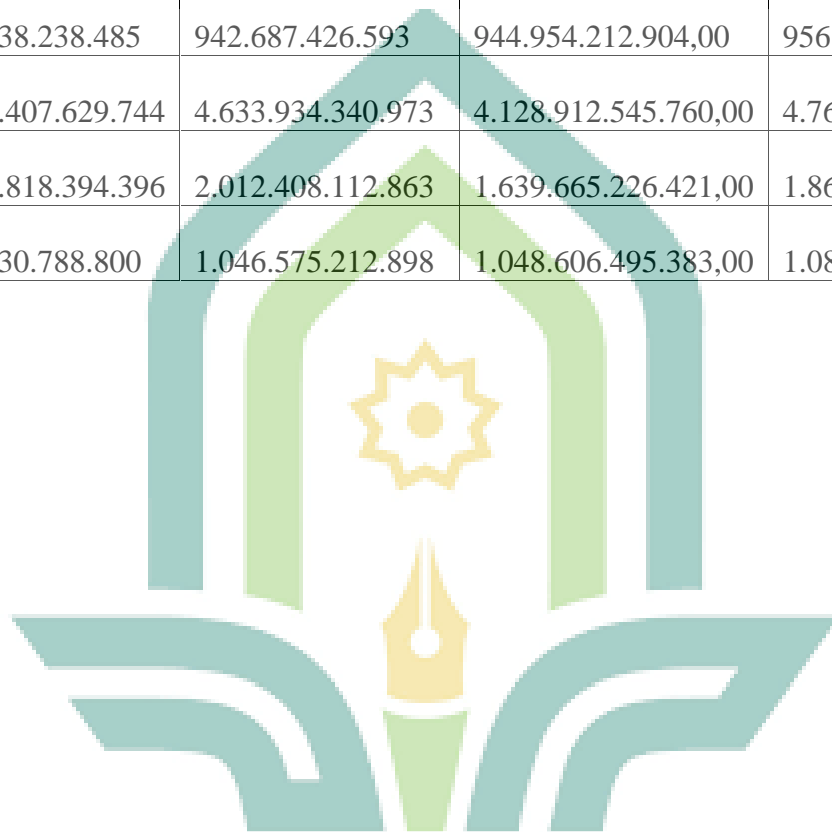
No.	Kab/Kota	Realisasi Belanja Daerah				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kab. Banjarnegara	2.119.096.683.202	2.123.033.797.431	2.030.532.397.495,00	2.042.019.297.374	2.039.210.930.404
2.	Kab. Banyumas	3.319.060.759.043	3.457.550.201.497	3.249.141.935.364,00	3.430.884.286.153	3.600.847.367.173
3.	Kab. Batang	1.687.215.725.890	1.755.066.560.019	1.662.512.932.221,19	1.780.425.131.876	1.801.913.436.483
4.	Kab. Blora	2.116.475.561.459	2.201.539.935.903	2.109.122.887.754,00	2.113.773.065.809	2.396.215.621.703
5.	Kab. Boyolali	2.203.112.762.252	2.381.601.864.739	2.339.805.517.025,00	2.268.508.827.348	2.471.827.429.489
6.	Kab. Brebes	2.825.364.002.156	3.132.251.740.580	2.955.050.373.005,00	3.126.226.470.519	3.091.285.559.556
7.	Kab. Cilacap	2.985.422.839.102	3.283.321.137.886	3.088.834.820.260,00	3.329.814.716.680	3.402.035.620.730

No.	Kab/Kota	Realisasi Belanja Daerah				
		2018	2019	2020	2021	2022
8.	Kab. Demak	2.050.065.954.050	2.309.815.550.608	2.285.742.096.591,00	2.336.015.725.797	2.487.342.627.299
9.	Kab. Grobogan	2.345.537.047.244	2.551.226.710.394	2.511.268.625.929,00	2.428.631.673.540	2.687.129.832.388
10.	Kab. Jepara	2.300.574.121.504	2.337.605.986.009	2.268.045.725.410,00	2.309.409.464.300	2.429.312.218.030
11.	Kab. Karanganyar	2.064.581.557.575	2.262.015.969.098	2.092.032.552.152,00	2.138.939.585.089	2.203.430.151.176
12.	Kab. Kebumen	2.652.047.980.376	2.809.549.444.627	2.737.861.916.080,00	2.779.840.698.100	2.824.358.293.725
13.	Kab. Kendal	2.148.450.040.419	2.331.683.034.136	2.041.114.766.533,00	2.069.958.006.821	2.499.014.019.249
14.	Kab. Klaten	2.611.007.499.826	2.682.356.733.814	2.545.164.494.577,00	2.493.406.881.542	2.527.619.332.474
15.	Kab. Kudus	1.957.701.652.495	2.061.664.156.540	1.914.626.257.581,00	1.879.122.990.401	2.231.500.773.692
16.	Kab. Magelang	2.486.540.561.169	2.568.593.603.007	2.304.375.917.161,00	2.413.163.788.892	2.570.326.001.677
17.	Kab. Pati	2.781.234.687.644	2.870.260.403.230	2.739.724.372.740,00	2.623.732.654.045	2.717.685.026.789
18.	Kab. Pekalongan	2.160.744.430.323	2.183.534.790.005	2.053.017.711.594,00	2.075.043.160.188	2.123.953.846.361
19.	Kab. Pemasang	2.324.288.798.012	2.584.470.869.519	2.664.990.530.908,00	2.524.558.785.164	2.504.262.139.265

No.	Kab/Kota	Realisasi Belanja Daerah				
		2018	2019	2020	2021	2022
20.	Kab. Purbalingga	1.924.908.432.550	2.062.727.850.424	1.894.875.529.380,00	1.999.904.829.992	2.122.762.527.980
21.	Kab. Purworejo	2.125.880.839.764	2.186.289.226.260	2.126.674.178.307,00	2.135.478.213.580	2.347.131.165.050
22.	Kab. Rembang	1.814.662.262.214	1.863.502.828.110	1.830.776.504.959,20	1.836.443.011.929	1.991.790.018.143
23.	Kab. Semarang	2.171.799.810.994	2.312.242.117.310	2.191.412.621.750,00	2.198.880.662.286	2.536.331.344.170
24.	Kab. Sragen	2.236.802.757.132	2.092.140.283.903	2.130.438.476.217,00	2.160.877.775.669	2.306.325.555.226
25.	Kab. Sukoharjo	2.050.161.904.519	2.114.149.361.513	2.073.080.966.909,00	2.089.455.558.854	2.042.027.814.977
26.	Kab. Tegal	2.575.620.503.042	2.717.431.598.854	2.505.539.949.419,52	2.776.664.042.487	2.722.064.917.511
27.	Kab. Temanggung	1.670.309.285.608	1.841.033.635.270	1.783.204.949.098,00	1.877.969.167.294	1.958.748.409.806
28.	Kab. Wonogiri	2.246.861.248.844	2.455.975.319.573	2.262.812.452.301,00	2.297.510.694.153	2.243.214.084.512
29.	Kab. Wonosobo	1.856.165.286.054	2.024.794.957.930	1.881.315.428.762,00	1.860.097.990.936	2.011.113.250.458
30.	Kota Magelang	937.345.746.470	995.162.119.612	798.353.191.714,00	935.047.734.177	1.039.501.502.733
31.	Kota Pekalongan	883.184.894.707	954.397.012.827	944.840.460.675,56	962.091.792.004	1.031.090.188.444



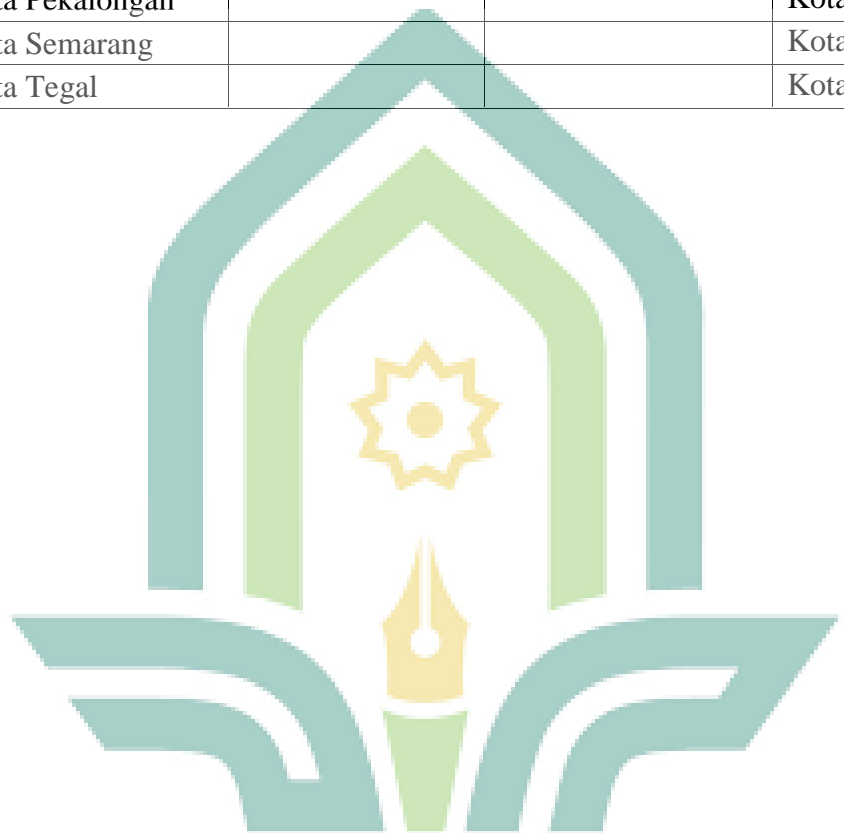
No.	Kab/Kota	Realisasi Belanja Daerah				
		2018	2019	2020	2021	2022
32.	Kota Salatiga	923.538.238.485	942.687.426.593	944.954.212.904,00	956.501.304.732	932.071.471.274
33.	Kota Semarang	4.506.407.629.744	4.633.934.340.973	4.128.912.545.760,00	4.764.045.946.157	4.871.946.697.040
34.	Kota Surakarta	1.914.818.394.396	2.012.408.112.863	1.639.665.226.421,00	1.866.496.348.304	2.088.323.395.600
35.	Kota Tegal	916.730.788.800	1.046.575.212.898	1.048.606.495.383,00	1.089.705.697.276	1.127.738.112.539



**5. Lampiran 5: Daftar Kabupaten/ Kota dan tingkat ekonomisnya tahun 2018- 2022**

<b>Daftar Kabupaten/ Kota dan tingkat ekonomisnya</b>						
<b>No.</b>	<b>2018</b>			<b>2019</b>		
	<b>Ekonomis Berimbang</b>	<b>Ekonomis</b>	<b>Tidak Ekonomis</b>	<b>Ekonomis Berimbang</b>	<b>Ekonomis</b>	<b>Tidak Ekonomis</b>
1.	Kab. Brebes	Kab. Banyumas	Kab. Demak	Kab. Banjarnegara	Kab. Banyumas	Kab. Grobogan
2.	Kab. Purworejo	Kab. Batang	Kab. Kudus	Kab. Boyolali	Kab. Batang	Kab. Kudus
3.	Kota Salatiga	Kab. Blora	Kab. Pati	Kab. Jepara	Kab. Blora	Kab. Pati
4.	Kota Surakarta	Kab. Boyolali	Kab. Pemalang	Kab. Wonosobo	Kab. Brebes	Kab. Rembang
5.		Kab. Cilacap	Kab. Semarang		Kab. Cilacap	Kab. Semarang
6.		Kab. Grobogan	Kab. Sragen		Kab. Demak	Kab. Wonogiri
7.		Kab. Jepara			Kab. Karanganyar	Kota Surakarta
8.		Kab. Karanganyar			Kab. Kebumen	
9.		Kab. Kebumen			Kab. Kendal	
10.		Kab. Kendal			Kab. Klaten	
11.		Kab. Klaten			Kab. Magelang	
12.		Kab. Magelang			Kab. Pekalongan	
13.		Kab. Pekalongan			Kab. Pemalang	
14.		Kab. Purbalingga			Kab. Purbalingga	
15.		Kab. Rembang			Kab. Purworejo	
16.		Kab. Sukoharjo			Kab. Sragen	
17.		Kab. Tegal			Kab. Sukoharjo	
18.		Kab. Temanggung			Kab. Tegal	
19.		Kab. Wonogiri			Kab. Temanggung	

20.		Kab. Wonosobo			Kota Magelang	
21.		Kota Magelang			Kota Pekalongan	
22.		Kota Pekalongan			Kota Salatiga	
23.		Kota Semarang			Kota Semarang	
24.		Kota Tegal			Kota Tegal	

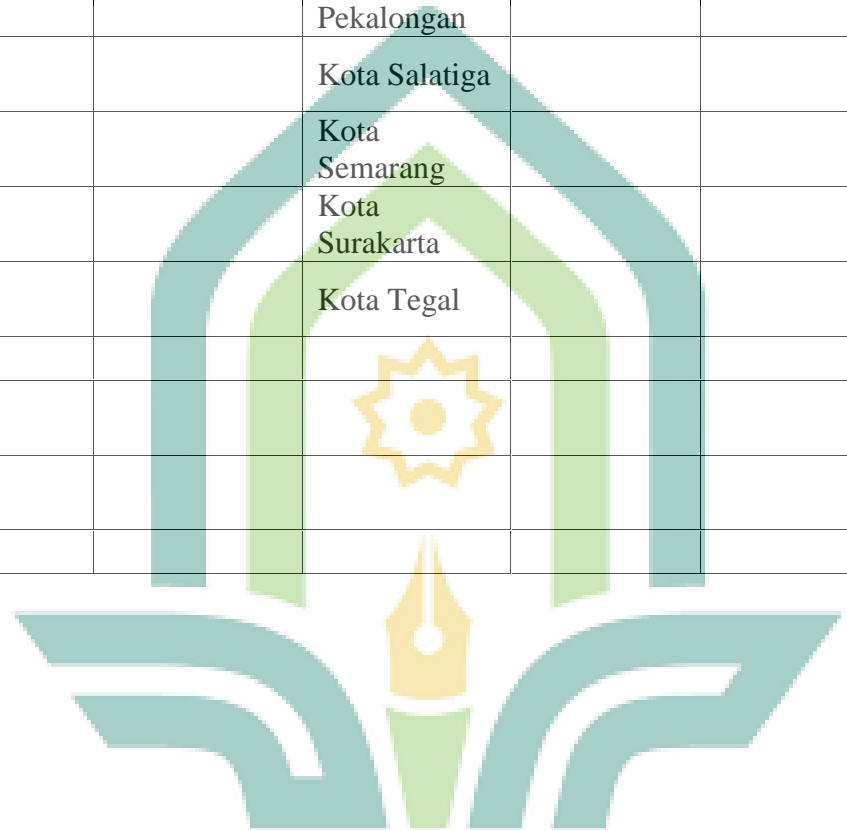


**Daftar Kabupaten/ Kota dan tingkat ekonomis di Tahun 2020**

No.	2020		2021			2022		
	Ekonomis	Ekonomis Berimbang	Ekonomis berimbang	Ekonomis	Tidak Ekonomis	Ekonomis berimbang	Ekonomis	Tidak Ekonomis
1	Kab. Banjarnegara	Kab. Kudus	Kab. Karanganyar	Kab. Banjarnegara	Kab. Jepara	Kab. Banyumas	Kab. Banjarnegara	Kab. Blora
2	Kab. Banyumas		Kab. Rembang	Kab. Banyumas	Kab. Kudus	Kab. Kendal	Kab. Batang	Kab. Boyolali
3	Kab. Batang			Kab. Batang	Kab. Semarang		Kab. Brebes	Kab. Demak
4	Kab. Blora			Kab. Blora			Kab. Cilacap	Kab. Grobogan
5	Kab. Boyolali			Kab. Boyolali			Kab. Jepara	Kab. Karanganyar
6	Kab. Brebes			Kab. Brebes			Kab. Kebumen	Kab. Kudus
7	Kab. Cilacap			Kab. Cilacap			Kab. Klaten	Kab. Pemasang
8	Kab. Demak			Kab. Demak			Kab. Magelang	Kab. Purbalingga
9	Kab. Grobogan			Kab. Grobogan			Kab. Pati	
10	Kab. Jepara			Kab. Kebumen			Kab. Pekalongan	

11	Kab. Karanganyar			Kab. Kendal			Kab. Purworejo	
12	Kab. Kebumen			Kab. Klaten			Kab. Rembang	
13	Kab. Kendal			Kab. Magelang			Kab. Semarang	
14	Kab. Klaten			Kab. Pati			Kab. Sragen	
15	Kab. Magelang			Kab. Pekalongan			Kab. Sukoharjo	
16	Kab. Pati			Kab. Pemalang			Kab. Tegal	
17	Kab. Pekalongan			Kab. Purbalingga			Kab. Temanggung	
18	Kab. Pemalang			Kab. Purworejo			Kab. Wonogiri	
19	Kab. Purbalingga			Kab. Sragen			Kota Semarang	
20	Kab. Purworejo			Kab. Sukoharjo			Kota Surakarta	
21	Kab. Rembang			Kab. Tegal			Kota Tegal	
22	Kab. Semarang			Kab. Temanggung			Kab. Wonosobo	
23	Kab. Sragen			Kab. Wonogiri			Kota Magelang	
24	Kab. Sukoharjo			Kab. Wonosobo			Kota Pekalongan	

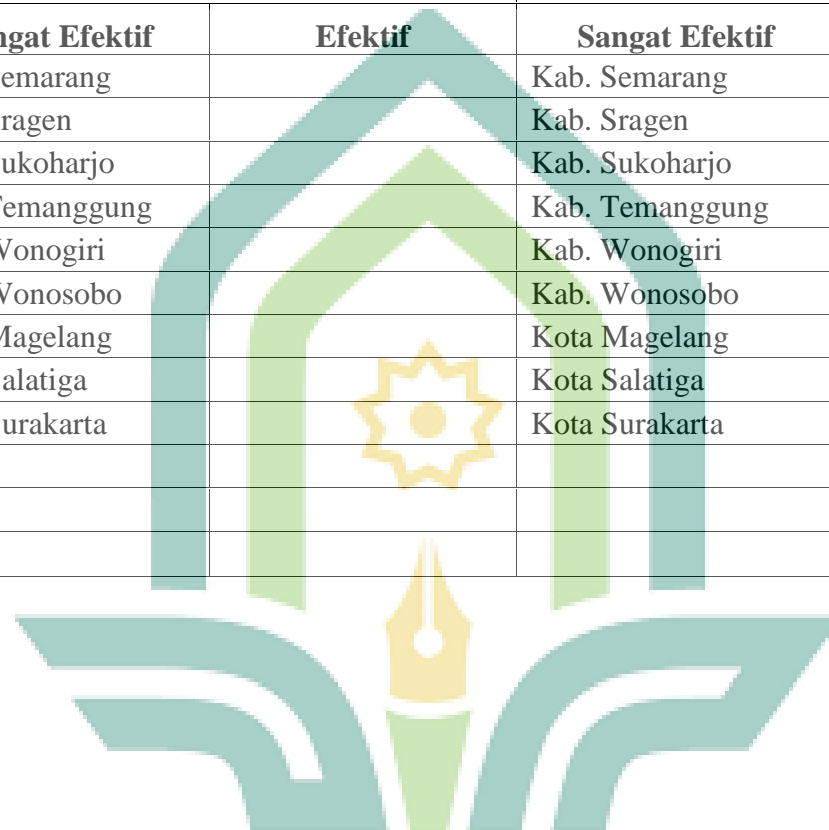
25	Kab. Tegal			Kota Magelang			Kota Salatiga	
26	Kab. Temanggung			Kota Pekalongan				
27	Kab. Wonogiri			Kota Salatiga				
28	Kab. Wonosobo			Kota Semarang				
29	Kota Magelang			Kota Surakarta				
30	Kota Pekalongan			Kota Tegal				
31	Kota Salatiga							
32	Kota Semarang							
33	Kota Surakarta							
34	Kota Tegal							



**6. Lampiran 6 : Daftar Kabupaten/ Kota dan tingkat efektivitasnya di tahun 2018- 2022**

<b>Daftar Kabupaten/ Kota dan tingkat efektivitasnya</b>				
<b>No.</b>	<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Sangat Efektif</b>	<b>Efektif</b>	<b>Sangat Efektif</b>	<b>Efektif</b>
1.	Kab. Banjarnegara	Kab. Blora	Kab. Banjarnegara	Kab. Batang
2.	Kab. Banyumas	Kab. Kebumen	Kab. Banyumas	Kab. Kendal
3.	Kab. Batang	Kab. Magelang	Kab. Blora	Kab. Magelang
4.	Kab. Boyolali	Kab. Pekalongan	Kab. Boyolali	Kab. Pekalongan
5.	Kab. Brebes	Kab. Purbalingga	Kab. Brebes	Kab. Purworejo
6.	Kab. Cilacap	Kab. Tegal	Kab. Cilacap	Kab. Tegal
7.	Kab. Demak	Kota Pekalongan	Kab. Demak	Kota Pekalongan
8.	Kab. Grobogan	Kota Semarang	Kab. Grobogan	Kota Semarang
9.	Kab. Jepara	Kota Tegal	Kab. Jepara	
10.	Kab. Karanganyar		Kab. Karanganyar	
11.	Kab. Kendal		Kab. Kebumen	
12.	Kab. Klaten		Kab. Klaten	
13.	Kab. Kudus		Kab. Kudus	
14.	Kab. Pati		Kab. Pati	
15.	Kab. Pemasang		Kab. Pemasang	
16.	Kab. Purworejo		Kab. Purbalingga	
17.	Kab. Rembang		Kab. Rembang	

<b>Daftar Kabupaten/ Kota dan tingkat efektivitasnya</b>				
<b>No.</b>	<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Sangat Efektif</b>	<b>Efektif</b>	<b>Sangat Efektif</b>	<b>Efektif</b>
18.	Kab. Semarang		Kab. Semarang	
19.	Kab. Sragen		Kab. Sragen	
20.	Kab. Sukoharjo		Kab. Sukoharjo	
21.	Kab. Temanggung		Kab. Temanggung	
22.	Kab. Wonogiri		Kab. Wonogiri	
23.	Kab. Wonosobo		Kab. Wonosobo	
24.	Kota Magelang		Kota Magelang	
25.	Kota Salatiga		Kota Salatiga	
26.	Kota Surakarta		Kota Surakarta	
27.				
28.				
29.				

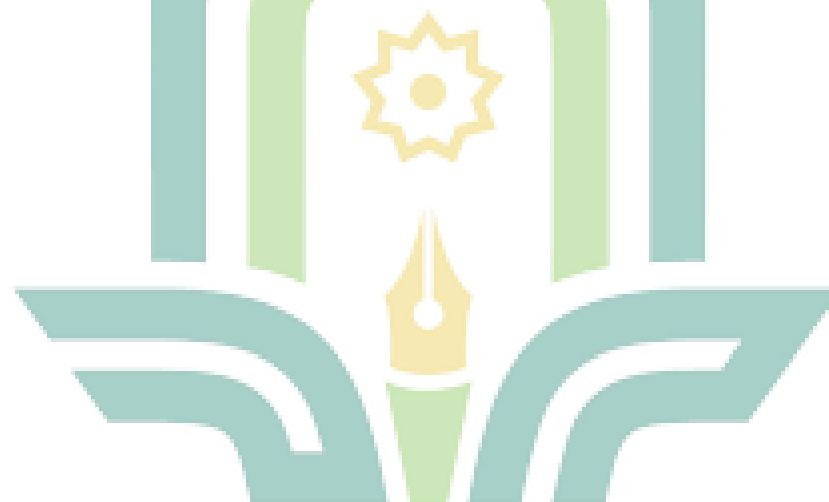




Daftar Kabupaten/ Kota dan tingkat efektivitasnya							
No.	2020			2021		2022	
	Sangat Efektif	Efektif	Cukup Efektif	Sangat Efektif	Efektif	Sangat Efektif	Efektif
1.	Kab. Demak	Kab. Banjarnegara	Kab. Pekalongan	Kab. Batang	Kab. Banjarnegara	Kab. Blora	Kab. Banjarnegara
2.	Kab. Kudus	Kab. Banyumas	Kota Semarang	Kab. Blora	Kab. Banyumas	Kab. Boyolali	Kab. Banyumas
3.	Kab. Sragen	Kab. Batang	Kota Tegal	Kab. Boyolali	Kab. Pati	Kab. Demak	Kab. Batang
4.	Kab. Sukoharjo	Kab. Blora		Kab. Brebes	Kab. Pekalongan	Kab. Grobogan	Kab. Brebes
5.	Kota Magelang	Kab. Boyolali		Kab. Cilacap	Kab. Wonogiri	Kab. Karanganyar	Kab. Cilacap
6.		Kab. Brebes		Kab. Demak	Kota Tegal	Kab. Kebumen	Kab. Jepara
7.		Kab. Cilacap		Kab. Grobogan		Kab. Klaten	Kab. Kendal
8.		Kab. Grobogan		Kab. Jepara		Kab. Kudus	Kab. Pekalongan
9.		Kab. Jepara		Kab. Karanganyar		Kab. Magelang	Kab. Purworejo
10.		Kab. Karanganyar		Kab. Kebumen		Kab. Pati	Kab. Rembang
11.		Kab. Kebumen		Kab. Kendal		Kab. Pemasang	Kab. Semarang
12.		Kab. Kendal		Kab. Klaten		Kab. Purbalingga	Kab. Wonosobo

Daftar Kabupaten/ Kota dan tingkat efektivitasnya							
No.	2020			2021		2022	
	Sangat Efektif	Efektif	Cukup Efektif	Sangat Efektif	Efektif	Sangat Efektif	Efektif
13.		Kab. Klaten		Kab. Kudus		Kab. Sragen	Kota Semarang
14.		Kab. Magelang		Kab. Magelang		Kab. Sukoharjo	Kota Surakarta
15.		Kab. Pati		Kab. Pemalang		Kab. Tegal	Kota Tegal
16.		Kab. Pemalang		Kab. Purbalingga		Kab. Temanggung	
17.		Kab. Purbalingga		Kab. Purworejo		Kab. Wonogiri	
18.		Kab. Purworejo		Kab. Rembang		Kota Magelang	
19.		Kab. Rembang		Kab. Semarang		Kota Pekalongan	
20.		Kab. Semarang		Kab. Sragen		Kota Salatiga	
21.		Kab. Tegal		Kab. Sukoharjo			
22.		Kab. Temanggung		Kab. Tegal			
23.		Kab. Wonogiri		Kab. Temanggung			
24.		Kab. Wonosobo		Kab. Wonosobo			
25.		Kab. Tegal		Kota Magelang			

Daftar Kabupaten/ Kota dan tingkat efektivitasnya							
No.	2020			2021		2022	
	Sangat Efektif	Efektif	Cukup Efektif	Sangat Efektif	Efektif	Sangat Efektif	Efektif
26.		Kab. Temanggung		Kota Pekalongan			
27.		Kab. Wonogiri		Kota Salatiga			
28.		Kab. Wonosobo		Kota Semarang			
29.		kota surakarta		Kota Surakarta			



**7. Lampiran 7 : Daftar Kabupaten/ Kota dan tingkat efisiensinya di tahun 2018- 2022**

<b>Daftar Kabupaten/ Kota dan tingkat efisiensinya</b>							
<b>No.</b>	<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</b>		
	<b>Kurang Efisien</b>	<b>Tidak Efisien</b>	<b>Kurang Efisien</b>	<b>Tidak Efisien</b>	<b>Kurang Efisien</b>	<b>Tidak Efisien</b>	<b>Cukup Efisien</b>
1.	Kab. Batang	Kab. Banjarnegara	Kab. Batang	Kab. Banjarnegara	Kab. Banyumas	Kab. Banjarnegara	Kota Magelang
2.	Kab. Blora	Kab. Banyumas	Kab. Blora	Kab. Banyumas	Kab. Batang	Kab. Pati	Kota Surakarta
3.	Kab. Boyolali	Kab. Jepara	Kab. Cilacap	Kab. Boyolali	Kab. Blora	Kab. Pemasang	
4.	Kab. Brebes	Kab. Klaten	Kab. Demak	Kab. Brebes	Kab. Boyolali	Kab. Sukoharjo	
5.	Kab. Cilacap	Kab. Magelang	Kab. Grobogan	Kab. Karanganyar	Kab. Brebes	Kota Salatiga	
6.	Kab. Demak	Kab. Pekalongan	Kab. Jepara	Kab. Kendal	Kab. Cilacap	Kota Tegal	
7.	Kab. Grobogan	Kab. Purworejo	Kab. Kebumen	Kab. Pati	Kab. Demak		
8.	Kab. Karanganyar	Kab. Rembang	Kab. Klaten	Kab. Purworejo	Kab. Grobogan		
9.	Kab. Kebumen	Kab. Semarang	Kab. Kudus	Kab. Rembang	Kab. Jepara		
10.	Kab. Kendal	Kab. Sragen	Kab. Magelang	Kab. Wonogiri	Kab. Karanganyar		

<b>Daftar Kabupaten/ Kota dan tingkat efesiensinya</b>							
<b>No.</b>	<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</b>		
	<b>Kurang Efisien</b>	<b>Tidak Efisien</b>	<b>Kurang Efisien</b>	<b>Tidak Efisien</b>	<b>Kurang Efisien</b>	<b>Tidak Efisien</b>	<b>Cukup Efisien</b>
11.	Kab. Kudus	Kab. Tegal	Kab. Pekalongan	Kab. Wonosobo	Kab. Kebumen		
12.	Kab. Pati	Kota Magelang	Kab. Pemalang	Kota Magelang	Kab. Kendal		
13.	Kab. Pemalang	Kota Salatiga	Kab. Purbalingga	Kota Salatiga	Kab. Klaten		
14.	Kab. Purbalingga	Kota Semarang	Kab. Semarang	Kota Semarang	Kab. Kudus		
15.	Kab. Sukoharjo	Kota Surakarta	Kab. Sragen	Kota Surakarta	Kab. Magelang		
16.	Kab. Temanggung		Kab. Sukoharjo	Kota Tegal	Kab. Pekalongan		
17.	Kab. Wonogiri		Kab. Tegal		Kab. Purbalingga		
18.	Kab. Wonosobo		Kab. Temanggung		Kab. Purworejo		
19.	Kota Pekalongan		Kota Pekalongan		Kab. Rembang		
20.	Kota Tegal				Kab. Semarang		

Daftar Kabupaten/ Kota dan tingkat efesiensinya							
No.	2018		2019		2020		
	Kurang Efisien	Tidak Efisien	Kurang Efisien	Tidak Efisien	Kurang Efisien	Tidak Efisien	Cukup Efisien
21.					Kab. Sragen		
22.					Kab. Tegal		
23.					Kab. Temanggung		
24.					Kab. Wonogiri		
25.					Kab. Wonosobo		
26.					Kota Pekalongan		
27.					Kota Semarang		
28.							
29.							
30.							
31.							



## Lampiran 8: Daftar Riwayat Hidup

### RIWAYAT HIDUP PENULIS

#### A. IDENTITAS

1. Nama : Rohayatul Akyani
2. Tempat, tanggal lahir : Batang, 29 Juni 2002
3. Alamat rumah : Ds. Wonorojo, RT.06/ Rw.01, Kec. Reban,  
Kab. Batang
4. Nomor Handphone : 085802472983
5. Email : akyanirohayatul@gmail.com
6. Nama Ayah : Asari
7. Pekerjaan Ayah : Petani
8. Nama Ibu : Wastri
9. Pekerjaan Ibu : Petani

#### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SD Negeri Wonorojo (2008-2014)
2. SMP : SMP Negeri 1 Reban (2014-2017)
3. SMA/ SMK : SMK Negeri 1 Blado (2017-2020)

#### C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. UKM U- Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, Devisi Kaligrafi,  
2021-2022
2. UKM U- Kaligrafi, Badan Pengurus Harian, 2022-2023

Pekalongan, 19 Juni 2024



Rohayatul Akyani